

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RANHIR RENJA)
Tahun 2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2

(dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah ini antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757) ;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Satuan Polisi Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4) ;
- m. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- 1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu pada periode renstra 2021-2026 dan perkiraan pelaksanaan DPA -SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan (tahun 2025).

Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah sd. Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 :
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kab. Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KO DE	URUSAN/ BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat daerah th. 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 2) 2024	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat capaian Realisasi Traget Renstra (%)
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1.05 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	B			B	B
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %		100 %	100 %	100 %
	Sub Kegiatan :							
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	2	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	3	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	100 %
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 or/bulan	965 or/bulan	$(67 \times 14) + (190 \times 6) = 2.078$ or/ bulan	2.078 or/bulan	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	12 paket	13 paket	13 paket	100 %
	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material	1 paket	1 paket	0	0	0

		yang disediakan					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 laporan	7 laporan	24 laporan	24 laporan	100 %
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%			100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daaerah Kondisi Baik	100%	100 %	100%	100%	100 %
Sub Kegiatan :							
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	34 unit	41 unit	41 unit	100 %
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100 %
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	17 unit	20 unit	20 unit	100 %
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	72 %	76,92 %	86 %	86 %	100 %
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota		Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	185 kasus	170 kasus	170 kasus	100 %
		Angka Penyakit masyarakat	44 kasus	41 kasus	37 kasus	37 kasus	100 %
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2120 orang	3117 Orang	3117 orang	3117 orang	100 %
Sub Kegiatan :							

1.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	134 kasus	120 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah laporan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan	2 kasus	2 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%
4.	Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM						
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Sub Kegiatan :							
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
2.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	25 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %
3.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah laporan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %

Pada renstra satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamomg Praja Kabupaten Lombok Tengah memiliki 2 program, 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Namun pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan capaian program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja persentase perda perkara yang ditegakkan target 72 % tercapai 76,92 % dengan capaian kinerja 106,83 %. Perhitungan Capaian indikator kinerja adalah jumlah perda perkara yang ditegakkan di bagi dengan jumlah perda perkara yang rencana akan ditegakkan di kali 100. Pada tahun 2024 jumlah perda perkara yang rencana akan ditegakkan adalah 13 perda dan perkara dan jumlah perda perkara yang berhasil ditegakkan pada tahun 2024 dalah 10 perda dan perkara sehingga capaian target kinerja adalah 76,92 %.Sedangkan untuk capaian masing-masing indikator kegiatan adalah :

1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota dengan indikator kinerja :

- Angka gangguan trantibum target 288 kasus capaian 185 kasus di mana pada tahun 2023 jumlah kasus gangguan trantibum 193 kasus. Hal ini menunjukkan ada penurunan kasus gangguan trantibum di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
- Angka penyakit masyarakat dari target 44 kasus realisasi 41 kasus di mana angka penyakit masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 45 kasus artinya terjadi penurunan kasus sebesar 8,9 %.
- Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum tahun 2024 adalah sebanyak 3117 orang dari target 3097 orang. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 3097 orang dari target 1980 orang. Anggota satlinmas sudah ada di 154 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 untuk kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota sebanyak 4 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang mencapai target adalah sebagai berikut :

- 1.1.1. Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- 1.1.2. Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM.
- 1.1.3. Sub kegiatan penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Sedangkan 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini,pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan pengawalan tidak mencapai target. Target pada tahun 2024 adalah 132 kasus namun realisasinya adalah 120 kasus (120 laporan). Indikator kinerja untuk sub kegiatan ini merupakan indikator

negative semakin rendah realisasi menunjukkan kinerja semakin baik. Dari capaian indikator kinerja sub kegiatan ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus gangguan trantibum di Kabupaten Lombok Tengah. Sehingga aktivitas pendukung sub kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Adapun aktivitas penunjang sub kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya kegiatan cegah dini dan deteksi dini di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah
- b. Terlaksananya kegiatan patroli di seputaran kota praya dan kawasan khusus
- c. Terlaksananya kegiatan pembinaan penyuluhan terhadap pelanggar perda perkara
- d. Terlaksananya kegiatan pengamanan acara/event-event daerah, aset-aset pemda.
- e. Terlaksananya kegiatan pengawasan pejabat penting daerah

1.2 Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota dengan indikator persentase penanganan pelanggaran perda dan perkara dengan target 100 % realisasi 100 %. Artinya setiap adanya pelanggaran perda dan perkara selalu dapat ditangani.

Sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 untuk Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota sebanyak 3 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang mencapai target adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Sub kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 1.2.2 Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkara
- 1.2.3 Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

1.3 Satpol PP kabupaten Lombok Tengah juga mendapat tugas perbantuan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dengan melaksanakan 2 program, yaitu :

- 1.3.1 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan kegiatan, yaitu Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat/pemangku kepentingan dengan rincian kegiatan:

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Sosialisasi langsung minimal 25 peserta	24 kali	24 kali	100 %
2.	Sosialisasi melalui media cetak spanduk	24 buah	24 buah	100 %

3.	Sosialisasi melalui media cetak sticker	1500 lembar	1500 lembar	100 %
4.	Sosialisasi melalui media online	3 kali	3 kali	100 %
5.	Sosialisasi pengumpulan masa dalam jumlah besar minimal 100 peserta	2 kali	2 kali	100

1.3.2 Program pemberantasan BKC Ilegal

No .	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi meliputi hasil tembakau	24 kali	24 kali	100 %
2.	Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dengan kantor wilayah bea cukai setempat yang diinisiasi oleh pemerintah daerah	6 kali	6 kali	100 %
3.	Operasi pasar bersama	2 kali	2 kali	100 %
4.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC Ilegal	12 buah	12 buah	100 %

	- Pengadaan Handy Talk			
--	------------------------	--	--	--

Adapun beberapa sub kegiatan pada renstra 2021-2026 Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

- 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 1.2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum.
- 1.3. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 1.4. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
- 1.5. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja nilai SAKIP OPD B, pada tahun 2024 realisasi tingkat akuntabilitas kinerja Satpol PP adalah B (baik) dengan Nilai hasil evaluasi 66,20. Sedangkan pada tahun 2023 tingkat akuntabilitas kinerja Satpol PP adalah B (baik) dengan Nilai hasil evaluasi 60,65. Artinya pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja mengalami peningkatan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 sebanyak 6 kegiatan dengan 28 sub kegiatan. Adapun beberapa indikator sub kegiatan pada renstra satpol pp 2021-2026 berbeda dengan indikator sub kegiatan pada renja 2024 karena adanya penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri 050-5889 tahun 2021.

Pelaksanaan anggaran Satpol PP Tahun 2024 yaitu Rp. 10.445.390.420,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 10.415.042.420 dan Belanja Modal Rp. 30.348.000 ,-. Realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.157.606.451 dengan realisasi keuangan mencapai 97,24 %.

Meskipun capaian kinerja tujuan dan sasaran OPD sudah tercapai namun ada beberapa permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparat dan badan hukum dalam penegakan perda dan perkara masih kurang;
2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD pengampu perda / perkara sehingga penegakan perda / perkara belum optimal;
3. Adanya peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga sulit ditegakkan;
4. Sarana prasarana penunjang tugas operasional masih belum memadai dan kurang layak digunakan akibatnya pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi;
5. Masih adanya pejabat fungsional Pol PP dan ASN Satpol PP yang belum mengikuti diklat dasar dan diklat teknis lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
6. Banyaknya anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah yang masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Sejalan dengan permasalahan di atas ada beberapa upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan atas perda dan perkara yang dilakukan terhadap masyarakat / badan usaha,
2. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan OPD pengampu perda / perkara untuk meningkatkan efektifitas penegakan perda / perkara;
3. Merencanakan revisi Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perda bisa efektif ditegakkan sesuai kondisi terkini ;
4. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang sehingga tugas operasional bisa lancar;
5. Mengajukan anggaran untuk diklat dasar dan diklat teknis lainnya serta berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah untuk peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
6. Mendorong dan memfasilitasi anggota Satpol PP untuk di angkat menjadi PNS atau P3K;

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun ini berbagai upaya yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Membentuk satuan tugas penyelenggaraan trantibum dan membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten Lombok Tengah sampai tingkat kecamatan, desa/ kelurahan sehingga pencegahan dan penanganan gangguan trantibumlinmas lebih efektif;
2. Membentuk dan mengaktifkan pengamanan lingkungan (siskamling) binaan dengan fasilitasi Pol PP kabupaten Lombok Tengah;

3. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi PPNS lingkup Kabupaten Lombok Tengah dengan diklat PPNS dan sekretariat PPNS;
4. Memperluas jaringan / saluran pengaduan pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman umum melalui telepon, whatsapp, sms atau media sosial Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah;
5. Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan revidi dan revisi RPJMD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan bagian dari pelayanan kebutuhan dasar masyarakat oleh Satpol PP, dalam aktivitas tugas dan fungsi ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini tampak dari fakta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, yang disertai dengan dinamika keluhan masyarakat akan ketidak nyamanan lingkungan. Beragam tuntutan dan diskursus yang sering mengemuka mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan ada gap antara harapan masyarakat dengan fakta yang terjadi. Dalam konteks ini menegaskan adanya permasalahan dalam pelayanan urusan ini oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkara, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh Satpol PP yang belum terpenuhi, akibat adanya pengaruh beberapa faktor internal maupun eksternal.

Dalam konteks inilah, dapat dikatakan bahwa kondisi aman, tertib dan nyaman ditengah masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek yang turut berpengaruh. Di pihak lain, tingkat pendapatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan aspek-aspek atau isu-isu yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pembangunan pada lingkup pemerintah daerah sesuai tahapan pembangunan yang ada pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka aspek yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan tugas harus dapat diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

1. Masih terjadinya gangguan ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Masih terjadinya pelanggaran perda dan perkara
2. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

3. Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibumlinmas
4. Masih kurangnya kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta belum terpenuhinya sarana prasarana minimal penunjang kegiatan
5. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Dalam perspektif inilah, Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah dituntut mampu bersinergi mendukung terwujudnya kondisi masyarakat yang penuh toleransi serta harmoni. Karena kondisi harmoni dan toleransi inilah yang pada gilirannya memberi andil besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban serta ketenteraman ditengah masyarakat. Disadari bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) harus ditopang oleh birokrasi yang baik dan kuat, hukum dan aturan terjaga dan ditegakkan, terlebih lagi kondisi keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat harus tetap terjaga dan stabil bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Inilah modal dasar utama pembangunan dapat berjalan lancar dan baik. Mewujudkan semua ini sudah pasti menuntut peran dan tanggung jawab Satpol PP, melalui fungsi pengawasan aparatur, masyarakat dan badan hukum di Kabupaten Lombok Tengah secara optimal dalam kerangka penegakan produk hukum daerah (Perda dan Perkada) yang pada akhirnya berkontribusi bagi pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Periode 2025-2029 tersebut.

Analisis kinerja pelayanan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok
Tengah ditampilkan sesuai tabel berikut :

**Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lombok Tengah**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1.	Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	-		18	17	16	15	18	17	16	15	
2	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	-		10%	10 %	10 %	10 %	10,06%	10,53 %	10 %	10 %	
3	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	-		32 %	33 %	34 %	35 %	32,12 %	35,14 %	84 %	86 %	
4	Persentase perda perkada yang ditegakkan			60 %	72 %	86 %	100 %	60,87 %	76,92 %	86 %	100 %	
5	Angka gangguan trantibum	-		288 kasus	288 kasus	288 kasus	288 kasus	193 kasus	185 kasus	170 kasus	155 kasus	
6	Angka Penyakit masyarakat			45 kasus	44 kasus	43 kasus	42 kasus	45 kasus	41 kasus	37 kasus	36 kasus	
7	Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum			1980 orang	2030 orang	2120 orang	2120 orang	3097 orang	3117 orang	3117 orang	3117 orang	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dalam Renstra 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap perubahan kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan tuntutan global serta perkembangan media sosial.

Adapun isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah :

2. Penyelenggaraan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum belum optimal
3. Penegakan perda dan perkara belum optimal
4. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal
5. Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibumlinmas belum optimal
6. Kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta sarana prasarana minimal penunjang kegiatan belum optimal
7. Tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan belum optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Permasalahan tersebut dapat berupa internal maupun eksternal serta rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya pelanggaran perda dan perkara

2. Masih adanya pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Masih kurangnya kualitas SDM satpol PP dan Satlinmas serta belum terpenuhinya sarana prasarana minimal penunjang kegiatan
5. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Sejalan dengan permasalahan di atas ada beberapa upaya pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2026, yaitu:

1. Menegakkan perda dan perkara baik secara yustisi maupun non yustisi dan menyusun strategi dalam mencapai kinerja satpol PP untuk menegakkan perda dan perkara.
2. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan optimal dengan menyusun strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum.
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara partisipatif dan komprehensif, menyusun strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melaksanakan koordinasi, kolaborasi dalam pelaksanaan penegakan perda perkara dan penyelenggaraan trantibum linmas.
5. Meningkatkan kapasitas SDM satpol PP dan satlinmas dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar.
6. Melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset secara tertib sesuai dengan regulasi, menggunakan anggaran secara tepat guna dan berhasil guna serta pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan secara efektif dan efisien sesuai SOP.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satpol PP bertugas untuk menegakkkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang di dalam pasal 255 ayat (1).

Pembagian urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di bagi menjadi 3 (tiga) urusan wajib yang merupakan

kewenangan pemerintah Kabupaten yaitu :

1. Sub urusan ketentraman ketertiban umum kewenangan pemerintah Kabupaten adalah :
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ Kota
 - b. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - c. Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota
2. Sub Urusan Bencana.
3. Sub Urusan Kebakaran.

Rancangan Akhir rencana kerja tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada rancangan Renstra 2025- 2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dikarenakan adanya pengurangan anggaran sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12.227.127.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				23.702.181.576	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	171.410.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	72.163.811	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Loteng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	31.298.689	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	19.965.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.485.960	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	19.965.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.485.960	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	19.965.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.485.960	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	19.965.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.485.960	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 dokumen	33.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	13 laporan	18.801.977	

			Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	33.275.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12.119.305	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loteng	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	10.939.522.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loteng	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100%	17.696.144.295	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 orang/bulan	10.907.022.000	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Loteng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(256 x14) = 3.584 orang/bulan	17.675.567.631	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.631.416	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	16 laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 laporan	18.945.248	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loteng	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loteng	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	494.937.100	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Loteng	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Paket	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Loteng	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Paket	484.937.100	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Loteng	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Loteng	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	245.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	259.534.391	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.860.558	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	57.339.727	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loteng	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	25.850.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loteng	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	25.850.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	60.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 paket	40.230.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Loteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Loteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.250.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Loteng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Loteng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	69.770.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase validasi data aset OPD	100%	250.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase validasi data aset OPD	100%	875.143.866	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	250.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Loteng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	300.000.000	
	Pengadaan Mebel	Loteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	Pengadaan Mebel	Loteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	3 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	65.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	361.750.314	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	75.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	57.960.240	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	laporan	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	303.790.074	

			Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase Barang Milik Daaerah Kondisi Baik	100%	555.595.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loteng	Persentase Barang Milik Daaerah Kondisi Baik	100%	530.756.321	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	145.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loteng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 unit	115.087.520	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	355.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan	Loteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	365.798.120	
	Pemeliharaan Mebel	Loteng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	7.320.500	Pemeliharaan Mebel	Loteng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	15.000.000	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Loteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	14.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	33.275.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loteng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	35.070.681	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100 %	4.690.094.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	100 %	3.411.751.478	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Loteng	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	1.471.501.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Loteng	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	170 kasus	1.516.348.164	
		Loteng	Angka Penyakit masyarakat	42 kasus			Loteng	Angka Penyakit masyarakat	40 kasus		
		Loteng	Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2210 orang			Loteng	Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	3117 orang		

	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	136 kasus	1.802.592.250	Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Loteng	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	334.224.532	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Loteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 kasus	146.484.375	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Loteng	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 laporan	40.925.000	
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	105.050.000	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 dokumen	25.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	873.421.875	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	152.930.756	
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Loteng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	275 orang	332.750.000	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Loteng	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	
	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 dokumen	275.000.000	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Loteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	50.000.000	

[illegible]

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	1.693.895.314	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	1.833.395.314	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	167.040.500	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	527.035.521	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	190 kali	127.050.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	83.200.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	181.500.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Loteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	768.659.793	
	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Loteng	Jumlah sarana prasarana penegakan peraturan daerah	Unit	0	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penegakan perda (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti	Loteng	Jumlah sarana prasarana penegakan peraturan daerah	2 unit	454.500.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah PPNS yang di bina	Orang	0	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Loteng	Jumlah PPNS yang di bina	6 orang	62.008.000	
	Pembentukan sekretariat PPNS	Loteng	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	dokumen	0	Pembentukan sekretariat PPNS	Loteng	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	1 dokumen	15.000.000	
	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Loteng	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	laporan	0	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Loteng	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 laporan	47.008.000	
	JUMLAH				17.117.221.500					23.702.181.576	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat di ukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan 5) di susun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sesuai tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, terdapat satu tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam renstra Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah 2025-2029 yakni **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat** dengan 2 (dua) indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Indeks Kriminalitas.

3.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yakni **Meningkatnya Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dengan 2 (dua) indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU) dan dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah Tahun 2026
Kabupaten Lombok Tengah

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator sasaran	Target Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	N/A	60
			Indeks Kriminalitas	42,06	41,75
			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	N/A	65
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas.	N/A	64
2.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Nilai Implementasi SAKIP PD	70,86	71,83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

Visi : " MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN HARMONIS (MASMIRAH)"

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Generasi Emas, Sehat Dan Cerdas.
- 2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Inklusif, Mudah, Tepat Waktu dan terjangkau .
- 3. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah.
- 5. Mengintegrasikan Nilai Akhlakul Karimah dan Nilai Budaya Luhur Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025-2029:

Misi 3	Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkelanjutan
Tujuan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat
Sasaran	Efektivitas Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Indikator kinerja dalam Renstra	1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)Persentase penurunan penyakit masyarakat 2. Indeks Kriminalitas 3. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sub urusan ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

	4. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas
Program 1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Program 1	Persentase perda perkara yang ditegakkan
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
	Rasio Jumlah Petugas Keamanan dan Sejenisnya Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Program 2	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program 2	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah

4.1 Program Dan Kegiatan

Dalam rangka implementasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada ranwal renja 2026 akan melaksanakan 2 program, 10 kegiatan, dan 60 sub kegiatan. Namun karena adanya kebijakan dari pusat untuk dilakukan pemangkasan anggaran sehingga pada ranhir renja 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah akan melaksanakan 2 program, 9 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sektoral daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 3 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 2. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 4. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 5. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 6. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Penyusunan Peta Kerawanan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum
 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan Sub Kegiatan :
 1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 2. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 3. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
 5. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 6. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah

7. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
8. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Lombok Tengah
 1. Pembentukan Sekretariat PPNS
 2. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

Program, Kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang HASIL VERIFIKASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Lombok Tengah

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelom- pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Satuan Polisi Pamong Praja						19.917.931.133,00						24.651.317.772,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.917.931.133,00							24.651.317.772,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						19.917.931.133,00							24.651.317.772,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pencapaian IKU Perangkat daerah	-			100 persen	18.571.527.636,00						-	20.685.692.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusketentuan	-			100 %	51.946.930,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan	-	-	117.800.000,00	

														sosial Masyarakat					
	1	0 5	0 1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.878.970,00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0 5	0 1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.806.960,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															Masyarakat				
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				256 Orang/bulan	15.925.006.822,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		19.420.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.201.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]

															Masyarakat				
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	5.911.766,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		20.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai standar	-		100 %	28.781.010,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial	-	-	155.940.000,00	

																Masyarakat				
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.410.888,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		4.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.796.122,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga	-		63.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

[illegible]

															kerukunan kehidupan sosial Masyarakat					
	1	0 5	0 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan urusan perangkat daerah yang berjalan lancar sesuai rencana kerja	-			100 %	2.198.160.240,0 0			-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifP enguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	373.800.000,00	
	1	0 5	0 1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	57.960.240,00	Kab. Lombo k Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial	-		63.800.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA

																Masyarakat				
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.140.200.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		310.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	-			100 %	351.907.140,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	569.252.000,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					42 Unit	319.419.640,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		502.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	7.400.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	25.087.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum	-		100 persen	1.346.403.497,00						-	3.965.625.772,00	
	1	05	02	2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-		100 %	243.467.038,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat	-	1.313.600.000,00	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					12 Dokumen	52.714.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat															
							Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan					1 Dokumen	3.001.740,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															

							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	113.919.200,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		363.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	24.750.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPenguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		45.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah															

						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					1 Laporan	4.100.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
						Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyarakat		44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja															

						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas					426 Orang	39.981.898,00	Kab. Lombo k Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	masyar akat		405.000.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA	
	1	0 5	0 2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran perda perkara yang ditangani	-			100 %	1.098.666.459,0 0			-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	2.374.525.772,00		
	1	0 5	0 2	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 laporan	4.960.000,00	Kab. Lombo k Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		275.000.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA	
	1	0 5	0 2	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																
							Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 dokumen	3.001.740,00	Kab. Lombo k Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		16.500.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA	
	1	0 5	0 2	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																

							Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	4.914.088,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		82.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah															
							Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan					12 laporan	4.800.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah															

							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda					12 Dokumen	5.040.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		82.500.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	404.999.736,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		632.500.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					12 Laporan	614.950.907,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan KolaboratifPenguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		845.525.772,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	55.999.988,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	-			2 orang	4.270.000,00			-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-	-	277.500.000,00	
	1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
							Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	2.275.000,00	Kab. Lombok Tengah , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

							Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 Laporan	1.995.000,00	Kab. Lombo k Tengah , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	PD-7 Transformas i Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Penguatan Tata Kelola Pemerintaha n dan Reformasi Birokrasi serta menjaga kerukunan kehidupan sosial masyarakat	-		27.500.000,00	SATUA N POLISI PAMON G PRAJA
											J U M L A H	19.917.931.133, 00							24.651.317.772,0 0	

BAB V

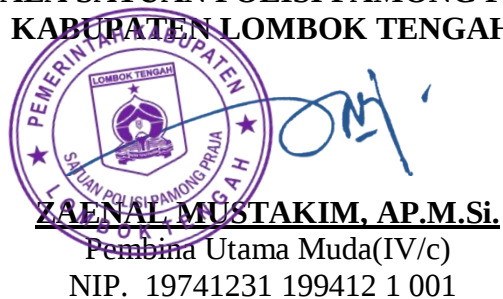
PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun 2026.

Dan untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah dan Kepala SKPD akan mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur NTB.

Praya , 27 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



ZAENAL MUSTAKIM, AP.M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19741231 199412 1 001